

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka kesimpulan dan saran yang dapat diberikan adalah:

1. Penerapan asas transparansi pada proses seleksi penerimaan PNS melalui sistem CAT di Universitas Lampung ditujukan untuk membangun kepercayaan publik kepada Universitas Lampung sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Penerapan prinsip transparansi dapat diukur melalui sejumlah upaya yang dilakukan Universitas Lampung seperti sistem keterbukaan dan standarisasi yang jelas dan mudah dipahami; pemahaman akan peraturan dan persyaratan; mekanisme pelaporan penyimpangan; penerapan prinsip akuntabilitas, dan berdasarkan atas peraturan hukum yang berlaku. Penerapan prinsip transparansi tercapai melalui kemudahan dan kebebasan publik untuk memperoleh informasi dari Universitas Lampung. Dengan pelaksanaan transparansi tersebut, publik tidak lagi curiga terhadap proses seleksi CPNS di Universitas Lampung dan karenanya keyakinan dan kepercayaan publik terhadap Universitas Lampung juga tinggi.

2. Proses seleksi penerimaan PNS melalui sistem CAT di Universitas Lampung sudah sesuai dengan asas transparansi dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, tetapi dalam pelaksanaannya masih belum maksimal. Keberhasilan transparansi proses seleksi penerimaan PNS melalui sistem CAT di Universitas Lampung ditunjukkan dengan meningkatkan keyakinan dan kepercayaan publik kepada Universitas Lampung bahwa seleksi penerimaan PNS melalui sistem CAT adalah bersih dan berwibawa; bertambahnya wawasan dan pengetahuan publik terhadap penyelenggaraan seleksi penerimaan PNS melalui sistem CAT; berkurangnya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam proses seleksi penerimaan PNS melalui sistem CAT. Sedangkan belum maksimalnya transparansi dikarenakan oleh kekurangan CAT pada proses seleksi administrasi awal juga tidak dijelaskan kriteria penyaringan peserta untuk bisa lolos seleksi Administrasi.

B. Saran

Atas dasar kesimpulan tersebut diatas, maka penulis mengemukakan saran-saran sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada Universitas Lampung penyebaran informasi pengadaan PNS lebih maksimal dalam menyebarkan informasi agar seluruh masyarakat mengetahui bentuk penyelenggaraan yang dilakukan oleh lembaga. Selain itu, Universitas Lampung diharapkan mampu memberikan informasi dan proses penyelenggaraan secara terbuka agar masyarakat tidak lagi beranggapan bahwa selalu ada kecurangan dalam kegiatan pemerintah.

2. Diharapkan dalam pendistribusian kewenangan penerimaan CPNS kepada lembaga di daerah, perlu tetap diawasi secara berkala dan berjenjang agar dalam pelaksanaan penerimaan CPNS di Universitas Lampung tidak menyalahi prinsip *good governance* sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, terutama terhadap asas transparansi dan kepastian hukum.